

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmara, Galang. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016).
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minn: West Publishing CO., 1968).
- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rineke Cipta, 1992).
- Daim, Nuryanto A. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014).
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Maulidiah, Sri. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014).
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. 2nd ed. (Malang: Setara Press, 2016).
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sururama R, Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. (Bandung : Cendekia Press, 2020).

Sujata, Antonius, Budhi Masthuri, Winarso, Dominikus Dalu Fernandes, dan Siska Widyawati. *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang Dan Masa Mendatang*. (Jakarta: The Asia Foundation Indonesia, 2002).

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Laporan

C. Jurnal

Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru.
*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik.
Vol. 4 No. 48, 2017, hlm. 1-9.

Solechan. *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Adminitrative
Law & Governance Journal. Vol. 1 No. 2, Mei 2019. hlm. 67 – 69.

Solechan. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Publik*. Administrative Law and Governance Journal. Vol. 2 No. 3.
Agustus 2019. hlm. 541–557.

D. Internet

Farasonalia, Riska. *PPDB Jateng Bermasalah, 85 Orangtua Calon Siswa
Mengadu Ke Ombudsman*. 25 Juni 2020.
[https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/25/14551911/ppd
b-jateng-bermasalah-85-orangtua-calon-siswa-mengadu-ke-
ombudsman](https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/25/14551911/ppdb-jateng-bermasalah-85-orangtua-calon-siswa-mengadu-ke-ombudsman). (diakses pada tanggal 20 September 2021).

<https://kbbi.web.id/layan>. (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021).

<https://kbbi.web.id/peran>, (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021).

Indonesia, Ombudsman Republik. *Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Di Lingkungan Pemprov Jateng*. 29 Mei 2021.
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-di-lingkungan-pemprov-jateng>.
(diakses pada tanggal 20 September 2021).